

WALI KOTA TUAL MALUKU JADI TERSANGKA KORUPSI 200 TON BERAS PEMERINTAH



Sumber Gambar : <https://totabuan.co/>

Wali Kota Tual, Maluku, Adam Rahayaan ditetapkan sebagai tersangka Kasus Korupsi 200 Ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) senilai Rp1,8 miliar pada Jumat (26/4) malam. Pantauan di lokasi, Adam Rahayaan mendatangi Gedung Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku sekitar pukul 14.00 WIT. Ia langsung menuju ruangan penyidik untuk menjalani pemeriksaan intensif. Adam Rahayaan mengikuti dua rangkaian pemeriksaan. Pemeriksaan pertama yakni sebagai saksi dalam Kasus Korupsi CBP, sedangkan pemeriksaan kedua terkait Kasus Korupsi CBP yang digelontorkan kepada masyarakat di Kota Tual, Provinsi Maluku Tahun 2016-2017.

Usai diperiksa, Adam Rahayaan langsung mengenakan rompi tahanan, ia lantas digiring ke ruangan konferensi pers di lantai II Gedung Ditreskrimsus Polda Maluku. Saat digiring, Adam Rahayaan tak berkomentar banyak kepada awak media. Ia hanya mengatakan 'nantinya saja' dan hanya melambaikan tangan. Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Maluku Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Hijra Soumena mengatakan Adam Rahayaan sempat memerintahkan anak buahnya bernama Abas. Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka lebih awal. Kala itu, Adam Rahayaan menyuruh Abas segera menyiapkan seluruh dokumen administrasi terkait permintaan 200 ton beras ke Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog). Dalam dokumen tersebut yang dibuat atas perintah Adam Rahayaan seolah-olah terjadi bencana alam. Usai dibuat, berkas tersebut kemudian dikirim ke Perum Bulog. Bulog kemudian menyalurkan 200 ton beras tersebut. Ternyata, ratusan ton beras tersebut digelontorkan untuk mendongkrak elektabilitas Adam Rahayaan yang maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tual. Untuk menyalurkan beras tersebut, Adam Rahayaan membuat program kartu aman. Kartu aman tersebut dibuat untuk menyalurkan beras kepada masyarakat dengan tujuan pada hari pencoblosan bisa mencoblos Adam Rahayaan sebagai wali kota. "Jadi seakan-akan masyarakat tahu bahwa beras itu milik Pak Adam

Rahayaan,"ujarnya saat menggelar konferensi pers di Gedung Krimsus Polda Maluku, Jumat (26/4) malam. Hujra Soumena mengklaim penetapan Wali Kota Tual sebagai tersangka Korupsi CBP yang diduga merugikan negara senilai Rp1,8 miliar itu profesional dan telah memenuhi alat bukti yang cukup.

Hujra Soumena membantah penetapan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sebagai tersangka ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tual yang juga diikuti oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku Kombes Pol Mohammad Roem Ohoirat. Mohammad Roem Ohoirat telah menyatakan siap maju sebagai Wali Kota Tual dan sudah mengambil formulir pendaftaran di sejumlah partai politik. "Tidak ada urusan itu, saya dalam rangka penegakan hukum profesional, saya melihat pada alat bukti yang ada, kalau memang alat bukti cukup, kita majukan perkara dan berkasnya, tidak ada hubungan dengan yang lain,"ucapnya.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Adam Rahayaan langsung ditahan selama 20 hari ke depan sambil menunggu persidangan. Ia dijerat Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 *Junto* (*Jo.*) pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Berita:

1. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240427022438-12-1091097/wali-kota-tual-maluku-jadi-tersangka-korupsi-200-ton-beras-pemerintah;>
2. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240427022438-12-1091097/wali-kota-tual-maluku-jadi-tersangka-korupsi-200-ton-beras-pemerintah;>
3. <https://ambon.tribunnews.com/2024/04/27/profil-adam-rahayaan-eks-wali-kota-tual-maluku-yang-jadi-tersangka-korupsi-200-ton-beras-pemerintah;>
4. <https://www.tvonenews.com/channel/news/179277-eks-wali-kota-tual-ditetapkan-sebagai-tersangka-korupsi;>
5. [https://terasmaluku.com/headline/2024/04/27/rugikan-negara-rp18-miliar-ini-modus-korupsi-cbp-tual-yang-seret-eks-walikota-sebagai-tersangka/; dan](https://terasmaluku.com/headline/2024/04/27/rugikan-negara-rp18-miliar-ini-modus-korupsi-cbp-tual-yang-seret-eks-walikota-sebagai-tersangka/)
6. [https://sentraltimur.com/jadi-tersangka-korupsi-mantan-wali-kota-tual-ditahan/.](https://sentraltimur.com/jadi-tersangka-korupsi-mantan-wali-kota-tual-ditahan/)

Catatan:

Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP merupakan strategi pemerintah dalam rangka mengantisipasi masalah pangan, keadaan darurat akibat bencana, kerawanan pangan pasca yang diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial. CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan

dikelola oleh Pemerintah pada Perum Bulog, dengan arah penggunaan untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana.

Keadaan Darurat Bencana dilakukan dengan menetapkan status Keadaan Darurat yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Penetapan status dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan skala Bencana. Prosedur permohonan penggunaan CBP untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dilakukan dengan cara bupati/wali kota mengajukan permohonan kepada Perum Bulog kantor wilayah/kantor cabang dengan melampirkan data jumlah korban yang menjadi acuan Perum Bulog mengeluarkan jumlah CBP.